PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

SKRIPSI

Oleh:

ASSASIYATUL FAIZAH

NIM: G92214028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Assasiyatul Faizah
NIM	:	G92214028
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi	:	Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Assasiyatul Faizah

NIM. G92214028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Assasiyatul Faizah NIM. G92214028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2018
Pembimbing

R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP. 197605102007012030

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Assasiyatul Faizah NIM. G92214028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP. 197605102007012030

Penguji II,

Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji III,

Nurlailah, MM
NIP. 196205222000032001

Penguji IV,

Andhy Permadi, M. Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASSASIYATUL FAIZAH
NIM : G92214028
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / AKUNTANSI
E-mail address : assasiyatul.faizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Penulis

(Assasiyatul Faizah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Penerapan *e*-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e*-system perpajakan yang meliputi *e*-Filing, *e*-SPT, dan *e*-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Ukuran sampel penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan didapat sampel sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adlaah *accidental sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e*-system perpajakan yang meliputi *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur memiliki pengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Nilai signifikan ditunjukkan dari nilai signifikan *e*-Filing = 0,000, *e*-SPT = 0,000, dan *e*-Faktur = 0,001. Nilai signifikan pada uji simultan yaitu 0,000. Adanya *e*-system perpajakan lebih memudahkan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga membuat Wajib Pajak Badan semakin patuh.

Diharapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha meningkatkan reformasi perpajakan dalam bentuk *e*-system ini menuju kearah yang lebih baik sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasi sesuai target. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Kata kunci: *e*-Filing, *e*-SPT, *e*-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Hasil Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
A. Landasan Teori 9
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 21
C. Kerangka Konseptual 25
D. Hipotesis 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis Penelitian 27
B. Tempat dan Waktu Penelitian 27
C. Populasi dan Sampel Penelitian 27
D. Variabel Penelitian 29
E. Definisi Operasional 29
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 31
G. Data dan Sumber Data 31
1. Jenis Data 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data 32
H. Teknik Pengumpulan Data 32
I. Teknik Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN 37
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 37
B. Statistik Deskriptif 45
C. Analisis Data 50
BAB V PEMBAHASAN 63
BAB VI PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

3.1 Indikator Penelitian 30

3.2 Alternatif Jawaban Skala Likert 31

3.3 Pedoman Uji Korelasi 34

4.1 Data Responden Berdasarkan WP Badan yang Menggunakan Konsultan dan yang Tidak Menggunakan Konsultan 47

4.2 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-Filing 49

4.3 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-SPT 49

4.4 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-Faktur 49

4.5 Jawaban Responden Berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 50

4.6 Daftar Hasil Skor Variabel Penelitian 50

4.7 Rentang Kategori Hasil Skor Berdasarkan Skala Likert 50

4.8 Hasil Uji Validitas *e*-Filing (X_1) 52

4.9 Hasil Uji Validitas *e*-SPT (X_2) 53

4.10 Hasil Uji Validitas *e*-Faktur (X_3) 53

4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan 54

4.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 54

4.13 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov 56

4.14 Hasil Uji Autokorelasi 57

4.15 Hasil Uji Multikolinearitas 58

4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 60

4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 60

4.18 Hasil Uji F 61

4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

2.1 Kerangka Konseptual 25

4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang 39

4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha 46

4.3 Data Responden Berdasarkan Tarif 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Data Hasil Penelitian
3. Data Hasil Olah Jawaban Kuesioner
4. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Variabel
5. Uji Asumsi Klasik
6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
7. Hasil Uji Korelasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan adalah penyumbang terbesar APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara). Beberapa tahun belakangan ini, kontribusi penerimaan pajak mulai meningkat di Indonesia. Berdasarkan Siaran Pers Nomor 03/2016, sebesar 1.055.61 triliun menjadi penerimaan pajak di tahun 2015. Total pertumbuhan penerimaan pajak adalah 7,15%. Sedangkan di akhir tahun 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai 1.105,9 triliun. Artinya penerimaan pajak tahun 2016 meningkat sebesar 50,29 triliun. Penyebab peningkatan pajak ini adalah adanya Pengampunan Pajak di tahun 2016 yang digembor-gemborkan oleh Pemerintah.[1]

Selain adanya pengampunan pajak, reformasi perpajakan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan pajak di tahun 2016. Reformasi perpajakan ini mencakup 2 area, yaitu yang pertama reformasi kebijakan dan dan yang kedua reformasi administrasi perpajakan. Teknologi yang terus menerus mengalami kemajuan, menuntut masyarakat untuk berkembang pula. Kemaujuan teknologi tersebut mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan reformasi pajak yang menghasilkan *e-system* perpajakan.

[1] Direktorat Jenderal Pajak, "Siaran Pers Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Realisasi Penerimaan Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Amir dan Setiyadi mengatakan "Beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak, yaitu melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dan meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak". Amir dan Setiyadi juga mengatakan bahwa yang mendorong rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yaitu administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa *e-system* yakni mencakup *e*-Filing, *e*-SPT, dan *e*-Faktur.

Aplikasi *e*-Filing merupakan salah satu pelaporan SPT dalam bentuk elektronik yang dilakukan di website DJP Online. Tujuan diterapkannya *e*-Filing yaitu untuk kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun tanpa harus ke KPP. Adanya penerapan aplikasi ini meminimalkan pemborosan penggunaan kertas. *e*-SPT yang diterapkan sekarang merupakan suatu aplikasi komputer untuk penyampaian SPT. *e*-SPT yang disediakan mencakup *e*-SPT Masa maupun Tahunan. Aplikasi *e*-Faktur merupakan suatu cara yang disediakan oleh DJP dalam hal pembuatan faktur pajak secara elektronik. Selain pembuatan faktur pajak, *e*-Faktur ini juga digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN bagi perusahaan yang sudah memiliki surat keputusan sebagai Pengusaha Kena Pajak.[2]

[2]Irma Indianti dkk, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)", (Jurnal Seminar Nasional IENACO—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 713.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peningkatan pajak memang terjadi di tahun 2016. Faktor peningkatan yang terjadi di tahun 2016 tersebut karena adanya tax amnesty dan *e-system* perpajakan, namun berdasarkan data perpajakan di pajak.go.id Jumlah Wajib Pajak Badan tahun 2016 yang wajib melaporkan SPT terdiri dari 1.184.816 WP Badan dan kenyataannya di tahun 2016 hanya sejumlah 676.405 WP Badan yang lapor SPT. Artinya rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan baru mencapai 57,09%.[3] Peningkatan pajak 2016 pun tidak mencapai jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah sebelumnya. Target penerimaan pajak tercapai hanya 2 kali dalam kurun waktu 11 tahun terakhir ini yaitu tahun 2004 dan 2008. Selain dua tahun itu, penerimaan pajak selalu meleset dari target yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kepatuhan pajak masih sangat kecil jika dilihat dari total pengusaha Indonesia yang berjumlah 3,10%, dari jumlah penduduk yang berada pada angka 261,1 juta jiwa, jika dihitung maka pengusaha di Indonesia berjumlah 8.000 juta pengusaha, hal ini harusnya dapat memaksimalkan jumlah penerimaan pajak Indonesia.[4] Menurut Rahman mengatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan."[5] Berdasarkan berita yang dipaparkan diatas, adanya peningkatan

[3]Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018

[4]Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,1 Persen", dalam http/www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/, diakses pada 28 Desember 2017

[5] Abdul Rahman, *Pandukan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (Bandung: Nuansa, 2010), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak ternyata masih belum bisa mengoptimalkan kepatuhan WP khususnya Wajib Pajak Badan.

Sesuai edaran LAKIN (Laporan Kinerja) Direktorat Jenderal Pajak 2016 menerangkan bahwa awalnya pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak sebesar 72,50%, namun realiasi di 2016 ini tidak mencapai target dan hanya menetap pada angka 63,15 %.[6] Faktanya banyak Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya bagaimana cara melaporkan SPT secara elektronik. Menurut Nurmantu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP adalah tingkat pemahaman pajak. Kemudahan dalam memenuhi perpajakan di dorong oleh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan kemudahan pemahaman peraturan perpajakan didukung dengan tingkat pendidikan atau pengetahuan WP.[7] Penyetoran dan pelaporan dijadikan oleh DJP sebagai pintu masuk dalam mengevaluasi kepatuhan wajib pajak.[8]

Pasal 29 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan tentang batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP OP disampaikan, sedangkan batas akhir pelaporan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, batas pembayaran/penyetoran pajak adalah sebelum SPT Tahunan PPh WP Badan

[6] Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja 2016", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018
[7] Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Granit, 2005), 32
[8] Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan, sedangkan untuk batas akhir penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal 31 April.[9]

Saat ini penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I masuk kedalam 10 besar dibandingkan kanwil-kanwil lain di Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim I mencatat penerimaan pajak pada 2016 mencapai Rp 39,3 triliun. Angka ini meningkat 21,3% dibandingkan capaian penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 32,4 triliun.[10] Sebesar 39,3 triliun tersebut termasuk penerimaan Pengampunan Pajak di tahun 2016. Berdasarkan beberapa hasil riset yang dilakukan oleh Yeni, Meivika, Fika dan Finola mengatakan bahwa saat terjadi peningkatkan realisasi penerimaan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya.[11] Peneliti ingin mengetahui apakah peningkatan sebesar 21,3% tersebut merupakan peningkatkan yang terjadi karena adanya *e-system perpajakan* atau Pengampunan Pajak yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan yang terjadi di tahun 2016.

Beberapa peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan *e*-system terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari menerangkan "penerapan sistem *e*-SPT meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT, Akan tetapi penerapan *e*-SPT tidak

[9]Pasal 29 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
[10] Nur Aini, "Realisasi Penerimaan Pajak 2016", dalam http://m.republika.co.id/, diakses pada 3 Januari 2018
[11] Fika agusti dan Finola Herawaty dkk, "Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Grogol Petanburan", (Jurnal dan Simposium Nasional Akuntansi—Universitas Indonesia, 2009), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak".[12] Penelitian yang dilakukan Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Indiranti, Suhendro, Endang Masitoh menerangkan bahwa "E-system perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan".[13] Adanya perbedaan penelitian ini juga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang ?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang ?

[12] Nurul Afia Sari, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electric (*e*-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 71.

[13] Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakn Terhdapat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)", (Jurnal Akuntansi—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 716

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memberikan beberapa kegunaan:

1. Manfaat Teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan penelitian dibidang perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Manfaat Praktis yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:
   a. Bagi Instansi Terkait, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi aparatur pajak maupun pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima melalui *e*-system serta dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan WP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk menambah pengetahuan mengenai mudahnya melapor SPT dengan menggunakan *e*-System Perpajakan.

c. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

Bermacam-macam definisi pajak dalam beberapa buku, akan tetapi pada hakikatnya memiliki arti dan tujuan yang sama. Pengertian pajak menurut Soemitro & Sugiharti mengatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Lebih lanjut, Soemitro berpendapat bahwa persetujuan rakyat terlebih dulu dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) dimana para anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, apabila DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang suatu pajak, dapat dikatakan bahwa rakyat telah menyetujui pungutan pajak yang disahkan oleh DPR Bersama Presiden. Pungutan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah undang-undang pajak yang ditempatkan ke dalam lembaran berita negara.[14]

Ragawino mengatakan bahwasannya agar dapat berlaku dan mengikat masyarakat, sebuah undang-undang harus ditetapkan dalam lembaran Negara dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

[14] Rachmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah syarat tersebut dipenuhi, berlaku suatu anggapan bahwa tiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut.[15]

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi bahwa "Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[16]

Menurut beberapa pakar memiliki definisi pajak tersendiri, Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki enam karakteristik pajak yaitu:[17]

1. Konstribusi wajib untuk negara ⇨ Objek
2. Terutang oleh WP OP atau Badan ⇨ Subjek
3. Sifatnya memaksa ⇨ Sifat
4. Berdasarkan UU ⇨ Landasan hukum
5. Tidak mendapatkan imbalan langsung ⇨ Kontraprestasi
6. Digunakan untuk kemakmuran rakyat ⇨ Tujuan

2. Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 menerangkan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar

[15] Prianto Budi, *Buku Pintar Pajak* (Jakarta: Pratama Indomitra, 2017), 39
[16] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 1
[17] Prianto Budi, *Buku Pintar Pajak*… , 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".[18]

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) / Badan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan dengan perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP didefinisikan menurut Pasal 1 UU KUP 2007 adalah "Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas bagi WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP".[19]

Abdul Rahman menerangkan bahwa "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".[20] Kepatuhan memiliki dua jenis yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) secara substantive / hakikat memenuhi ketentuan material sesuai dengan isi maupun jiwa dari Undang-Undang Perpajakan disebut sebagai kepatuhan material. Sedangkan suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal dalam UU perpajakan disebut sebagai kepatuhan formal.

---

[18]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1"
[19]Prianto Budi, Buku Pintar Pajak …, 67
[20] Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan….,* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam website resminya pajak.go.id mengatakan bahwa "Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak". Ketika jumlah kepatuhan Wajib Pajak (WP) semakin tinggi, maka jumlah penerimaan pajak pun juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menumbuhkan sifat kepatuhan pajak yang akan dijadikan sebagai agenda utama Direktorat Jenderal Pajak untuk memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, wawasan, dedikasi dan tanggungjawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam website resminya www.pajak.go.id menjelaskan bahwa "Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya." Dalam website resminya tersebut juga mengatakan "Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)."[21]

[21] Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 5 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/207 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
b. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
d. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

a. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak Indikator kepatuhan wajib pajak yakni sebagai berikut ini:

1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan[22]

3. *e*-System Perpajakan

e-System perpajakan adalah suatu sistem perpajakan yang diperuntukan dalam administrasi pajak. *e*-System terdiri dari:

a. *e*-Filling

Berdasarkan PER-01/PJ/2014 menjelaskan bahwa *e*-Filing merupakan cara untuk melaporkan SPT baik itu Masa atau Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online tanpa harus ke KPP.[23]

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak RI Nomor 47 Tahun 2008 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2008 mengatur mengenai cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT secara elektronik yaitu *e*-Filing baik melalui website djponline.pajak.go.id maupun melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi.

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan SPT ke KPP karena jarak yang jauh, *e*-Filing menjadi solusi untuk melaporkan pajak dengan cepat tanpa membuang waktu dan tenaga Wajib Pajak.

[22] Sri Rahayu dan Lingga Salsalina Ita, ”Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138

[23] PER-01/PJ/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Electronic Filing Identification Number* (*e*-FIN)

e-FIN merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan *e*-FIN dimana nomor ini digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai secara online. Permohonan nomor *e*-FIN dapat langsung diberikan pada saat itu juga yakni saat Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP.

Pengajuan nomor *e*-FIN tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain walaupun menggunakan surat penunjukan / surat kuasa. Pengajuan *e*-FIN hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak bersangkutan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dengan membawa formulir permohonan *e*-FIN, KTP dan NPWP jika Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan hanya perlu mengisi formulir permohonan *e*-FIN serta membawa KTP pengurus, NPWP pengurus, NPWP Badan, dan Fotocopy Akta Pendirian.

Pencetakan nomor *e*-FIN dapat dilakukan ketika nomor *e*-FIN hilang. Cetak ulang nomor hanya dapat dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara membawa KTP dan NPWP bagi WPOP. Sedangkan untuk Badan yaitu NPWP Badan, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.[24]

[24] Billy Ivan Tansuria, *Pokok Pokok Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *e*-SPT

e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah aplikasi komputer yang berisi komponen surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital. *e*-SPT sebagai alat/media untuk pelaporan pajak bagi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan nantinya akan dilaporkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar atau melalui *e*-Filing yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya *e*-SPT ini dapat meringankan Wajib Pajak karena tidak perlu menulis tangan dan menghitung secara manual. *e*-SPT dapat melakukan perekaman dan penyimpanan data secara lebih terorganisasi.[25]

e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini mencakup dua jenis yaitu e-SPT Masa (PPh 21 / 26, PPh 22, PPh 23 / 26, PPh 4 ayat 2) dan e-SPT Tahunan (1771, 1770, 1770S dan 1770SS). Waktu Penyampaian *e*-SPT melalui *e*-Filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari tanpa harus menyesuaikan jam kerja di KPP. Penyampaian juga dapat dilakukan 7 hari penuh sehingga jangka waktu penyampaian lebih lama dari pada ketika kita ke KPP langsung yang harus menyesuaikan dengan hari kerja KPP.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan melalui menggunakan *e*-SPT, dapat dilakukan pembetulan dalam bentuk elektronik (*e*-SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan

[25]Ibid, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menggunakan *e*-SPT, dapat dilakukan pembetulan menggunakan *e*-SPT ataupun tidak.

c. *e*-Faktur

Menurut website resmi dari Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id "e-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak." Selain itu juga menjelaskan "Bentuk e-Fakur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas."[26]

Secara sederhana, aplikasi e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan fakur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN 1111. Aplikasi ini menggantikan sekaligus memperbaiki aplikasi yang sudah ada sebelumnya yaitu e-SPT PPN 1111. Saat menggunakan aplikasi e-SPT, *user* harus menerbitkan faktur pajak secara tersendiri/manual dan baru lah saat akan membuat laporan SPT Masa PPN, aplikasi e-SPT PPN 1111 dijalankan. Dengan aplikasi e-faktur, kedua hal tersebut kini telah disatukan.

[26] Irma Indrianti dkk, "Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)" …,713

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara aplikasi *e*-SPT dan *e*-Faktur dasi sisi penggunaan adalah proses instalansinya. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang diinstall pada computer sedangkan e-Faktur adalah aplikasi desktop yang tidak memerlukan instalasi (hanya berupa folder yang berisi beberapa file). Perbedaan ini membuat aplikasi e-Faktur lebih mudah untuk dipindahkan antar computer, yaitu cukup dengan memindahkan folder e-faktur saja (*copy-paste*).[27]

Aplikasi e-Faktur telah menyediakan pengaturan hubungan antar beberapa komputer melalui LAN (*Local Area Network*). Misalnya, pada suatu divisi pajak beranggotakan beberapa orang staf yang dikepalai oleh seorang manager maka dapat dibuatkan pembagian tugas yang spesifik. Staf akan melakukan *entry* data faktur, sedangkan manager akan melakukan *review*. Semua dilakukan menggunakan komputernya masing-masing dengan hubungan *server-client* melalui LAN.

Aplikasi e-Faktur juga telah didesain dengan tingkat pengaman yang lebih tinggi dari pada aplikasi e-SPT PPN 1111 yang hanya berupa password login saja. Saat menggunakan aplikasi e-Faktur, kita akan mengenal Sertifikat Digital, *Passphrase*, *Password* Enofa, Kode Aktivasi, Kode Aktivasi e-Faktu Desktop, *Username* dan *Password Login*, Serial Number dan variasi *Captcha* yang berubah-ubah.[28]

---

[27] And Hardi dan Sjafardamsah, *Sosulis Sukses e-Faktur*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 39
[28] Ibid, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua data faktur pajak harus diunggah/upload ke sistem *server* DJP untuk mendapatkan status *Approval*. *Approval* berarti DJP telah menyalin semua detil data faktur pajak, mencocokan isian faktur dnegan aturan yang berlalku, dan akhirnya memberikan persetujuan/*approval* berupa QR *Code* pada lembaran faktur. *User* hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *Approval*. Pada saat mengubah data, dapat dimungkinkan sistem server DJP memberikan jawbaan berupa *Reject*. Ini berarti terdapat isian data pada faktur pajak yang belum sesuai. Status *Reject* akan disertai dengan keterangan tentang kekeliruannya *User* perlu memperbaiki isian faktur sesuai keterangan dan mengunggah data kembali. Setelah memperoleh status *Approval*, barulah faktur pajak dapat disampaikan kepada lawan transaksi. Di sisi lawan transaksi, faktur pajak hasil keluaran dari proses tersebut dapat dipastikan validitas datanya sehingga relatif lebih aman ketika dikreditkan.

Ketentuan tentang penerbitan faktur pajak berbentuk elektronik melalui aplikasi *e*-Faktur, didasarkan pada aturan sebagai berikut, yaitu:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak 1 April 2013) tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak.

Dari kedua peraturan tersebut, faktur pajak elektronik pada prinsipnya tidak mengubah aturan umum tentang PPN, seperti tentang saat dan tempat terutangnya PPN, penggunaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, maupun tentang penggolongan Barang Kena Pajak (BK) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai objek PPN. Hal yang berubah hanya berkisar tentang bagaimana cara teknis menerbitkan faktur pajak.[29]

Indikator *e*-System Perpajakan (*e*-SPT, *e*-Faktur dan *e*-Filing) adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan pelaporan SPT
2. Penghematan biaya
3. Kecepatan perhitungan
4. Kemudahan perekaman data
5. Kemudahan perekaman data
6. Kepuasan penggunaan
7. Lebih ramah lingkungan
8. Meminimalisir tingkat kesalahan
9. Lebih mudah ketika meminta NSFP

[29] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Mencegah terjadinya faktur palsu karena munggunakan barcode.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sari Nurhidayah, Penelitian yang dilakukan oleh Sari berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *e*-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten".[30]

   Penelitian yang dilakukan oleh Sari ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif korelasional. Populasinya adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini yakni adanya persamaan variabel *e*-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya antara lain yaitu subjek, objek, metode pengambilan data, tempat, waktu penelitian dan penambahan variabel independen yaitu *e*-SPT dan *e*-Faktur.

2. Irma Indrianti, Suhendro, Endang Masitoh, penelitian yang dilakukan ini memiliki judul "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta).

   Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang

[30] Sari Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem *E*-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdaftar di KPP tempat peneliti melakukan penelitian. Dari populasi sebesar 9.910, peneliti menggunakan sampel sebanyak 99 Wajib Pajak Badan. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya persamaan variable yaitu *e*-SPT, *e*-faktur dan *e-Filing* dan Kepatuhan Pajak. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, metode pengambilan data, tempat dan waktu penelitian serta pengurangan variabel bebas *e*-Biling.[31]

3. Naniek Noviari, berjudul "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan *e*-Biling dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan".

   Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan asosiatif. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penilitan ini adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak Badan yang berjumlah 628 pengusaha. Sampel yang diambil menggunakan Teknik *simple random sampling* yaitu sebanyak 87 responden. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey.

   Persamaan penelitian Naniek Noviari dengan penelitian ini terletak pada persamaan variabel independen yaitu (*e*-SPT) dan variabel dependen (Wajib Pajak Badan), sedangkan perbedaannya yaitu adanya penambahan

[31] Irma Indianti dkk, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)"…, 716

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel independen (*e*-Faktur dan *e*-Filing), juga perbedaan letak dan waktu penelitian.[32]

4. Inne Nidya Astuti "Analisis Penerapan *e-Filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Gresik Utara".

   Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data statistik yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penerimaan SPT Tahunan sejak 2012 – 2014. Kesimpulan dari penelitian ini menerangkan bahwa penerapan *e-Filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat.

   Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel bebas yaitu penerapan *e*-Filing, variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini antara lain: subjek, objek, tempat, metode penelitian yang digunakan dan waktu penelitian serta penambahan variabel bebas yaitu: *e*-spt dan *e*-faktur.[33]

---

[32] Naniek Noviatri, "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan *e*-Biling dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajaan", (Jurnal Akuntansi—Universitas Udayana, 2016), 1025

[33] Inne Nidya Astuti, "Analisis Penerapan *e*-Filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresi Utara", (Jurnal Akuntansi—Universitas Negeri Surabaya, 2016), 1021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nofi Purnama Sari berjudul "Pengaruh Penerapan *e*-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)".

   Populasi yang menjadi objek penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak badan yang terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP Madya Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa manfaat, persepsi kegunaan dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Malang. Persepsi kemudahan kegunaan (*ease of use*) diketahui sebagai variabel bebas paling dominan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam model regresi linier berganda.

   Persamaan pada penelitian ini terdapat pada salah satu variabel bebas yaitu: penerapan SPT secara elektronik dan salah satu indikator kuesioner. Indikator kuesioner yang digunakan adalah penerapan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek, objek, variabel terikat, tempat dan waktu penelitan serta adanya penambahan variabel independen yaitu *e*-SPT dan *e*-Faktur.[34]

[34] Novi Purnama Sari, "Pengaruh Penerapan *e*-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang), (Tesis—Universitas Brawijaya, 2014), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Konseptual

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, untuk memperjelas gambar penelitian ini, maka disusun sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

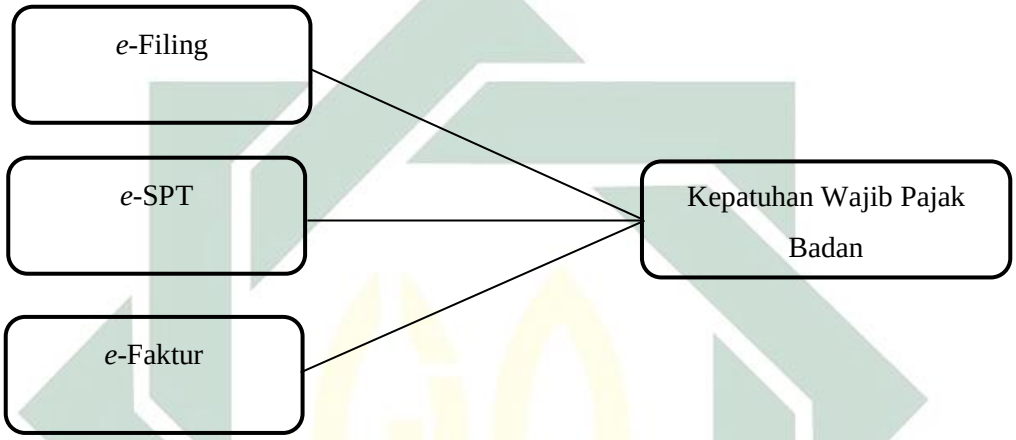

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono menerangkan "hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."[35] Berdasarkan penjelasan kerangka konseptual dan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

H2: Terdapat pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2015), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H3: Terdapat pengaruh penerapan *e*-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

H4: Terdapat pengaruh penerapan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penggunaan penelitan kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan perhitungan statistik untuk mempermudah dalam pengolahan data yang didapat dari indikator-indikator yang berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan asosiatif yang memiliki definisi sebagai suatu pendekatan yang mampu menunjukkan pengaruh e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur pada kepatuhan perpajakan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya dengan alamat Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, dimulai pada 1 Februari 2018 sampai dengan bulan 31 April 2018.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Merujuk pada masalah penelitian, populasi yang digunakan adalah seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jumlah populasi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang terdiri dari 4.233 Badan.

2. **Sampel**

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidential sampling. Accidential sampling adalah metode pengambilan responden sebagai sampel yang dilakukan berdasarkan suatu kebetulan, yaitu suatu kondisi dimana peneliti secara kebetulan bertemu dengan responden yang cocok sebagai data.36

Ukuran sampel penelitian di KPP Pratama Surabaya Karangpilang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin: 37

$$\mathrm{n} = \frac{N}{1 + Na^2}$$

$$\mathrm{n} = \frac{N}{1 + N(0{,}1)^2}$$

$$\mathrm{n} = \frac{4233}{1 + 4233(0{,}1)^2}$$

$$\mathrm{n} = 100$$

Keterangan :

n : besaran sampel.

N : Ukuran populasi.

a : Nilai kritis (batas ketelitian) yang digunakan.

[36] Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 124.
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, dan R&D ..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat merupakan sebutan lain dari variabel dependen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat adalah sebutan lain dari variabel dependen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan.[38]

Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel bebas.[39] Penelitian ini menggunakan *e*-Filing, *e*-SPT dan *e*-Faktur sebagai variabel independennya.

E. Definisi Operasional

1. Variabel Dependen
   a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

      Kepatuhan terhadap perpajakan yaitu kondisi ketika Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.
2. Variabel Independen
   a. *e*-Filing

      e-Filing adalah cara pelaporan Surat Pembetitahuan elektronik yang dilakukan secara online tanpa harus ke KPP langsung.

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ..., 54
[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* …, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyampaian online bisa melalui website resmi djponline maupun lewat perusahaan penyedia jasa aplikasi.

b. *e*-SPT

e-SPT yaitu aplikasi komputer yang berisi komponen surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya secara elektronik.

c. *e*-Faktur

e-Faktur kurang lebih sama dengan *e*-SPT, akan tetapi *e*-Faktur ini khusus untuk PPN. *e*-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh DJP.[40]

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuranya
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Likert 1-5
	b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	Likert 1-5
	c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	Likert 1-5
	d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Likert 1-5
e-Filing (X_1)	a. Kecepatan pelaporan SPT	Likert 1-5
	b. Lebih hemat	Likert 1-5
	c. Kemudahan pengisian SPT	Likert 1-5
	d. Kelengkapan data pengisian SPT	Likert 1-5
	e. Lebih ramah lingkungan	Likert 1-5
	f. Tidak merepotkan	Likert 1-5
e-SPT (X_2)	a. Kemudahan perekaman data	Likert 1-5
	b. Kecepatan perhitungan	Likert 1-5
	c. Penghematan kertas dan biaya	Likert 1-5
	d. Lebih ramah lingkungan	Likert 1-5
	e. Efisiensi bukti pengesahan karena tidak perlu di cetak	Likert 1-5

[40] Direktorat Jenderal Pajak, "*e*-Faktur", dalam http://www.pajak.go.id/content/article/e-faktur, diakses pada 3 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e-Faktur (X_3)	a. Meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak	Likert 1-5
	b. Lebih mudah ketika meminta NSFP	Likert 1-5
	c. Mencegah terjadinya faktur palsu karena munggunakan barcode	Likert 1-5

Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran yang tepat dan cermat untuk masing-masing instrumen yang ada dalam penelitian sehingga penelitian tersebut dianggap sah. Instrumen dinyatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel}. Uji validitas menggunakan program computer SPSS V.16.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah cara mengukur keandalan suatu item yang menjadi variabel dalam penelitian. Item dalam kuesioner dikatakan layak atau handal apabila jawaban atas pertanyaan bersifat konsisten. Item dalam kuesioner bersifat layak ketika *cronbach's alpha* > 0,6 dan bersifat tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak ketika *cronbach's* alpha > 0,6.[41]

G. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang disebar kepada sampel penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai indikator-indikator dari variabel yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti saat di lapangan. Adapun sumber yang di ambil dalam penelitian ini sebagai data primer adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Menyebarkan kuesioner adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kuesioner berupa daftar pertanyaan mengenai Kepatuhan Pajak, *e*-SPT, *e*-Faktur, dan *e*-Filing yang kemudian akan diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebagai responden.

[41] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. Edisi 9* (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Husein Umar menerangkan "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal." Cara mendeteksi normalitas data pada penelitian dapat dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov Test (K-S).* Apabila nilai probabilitas signifikan K-S ≥ 5% atau 0,05, maka data berdistribusi normal.[42]

b. Uji Linearitas

Uji linieritas dipergunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak. Uji linieritas ini dapat dilihat dari nilai signifikan pada nilai Linearity, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikan < 0,05 maka variabel bersifat linier, begitu pula sebaliknya.[43]

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya

[42] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 180.
[43] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9* ..., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tolerance Value dan *Varience Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.[44]

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dapat diketahui jika probabilitas signifikan menunjukkan tingkat kepercayaan diatas 5%.[45]

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Apabila korelasi tidak terjadi maka problem autokorelasi tidak ada, begitu pula sebaliknya. Cara yang digunakan untuk mengetahui auto korelasi adalah dengan uji Durbin-Waston (DW test) yakni sebagai berikut:[46]

Tabel 3.3 Pedoman Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negative	Tolak	4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negative	No decision	4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokoelasi positif atau negative	Tidak ditolak	du < d < 4 – dl

[44] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9* …, 105
[45] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 2* …,179
[46] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*..., 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Uji Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel.[47] Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka konseptual, maka uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai data dan variabel yang ada sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Deskripsi yang dilakukan dapat berupa tabel, diagram dan lainnya.

b. Uji Statistik

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga mengginakan Analisis Regresi Linier Berganda. Kegunaan dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Y).

1. Persamaan Regresi Linier Berganda adalah sebagai beirkut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* …,84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

α = Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

X1 = e-SPT

X2 = e-Faktur

X3 = e-Filing

ε = Error

2) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang ada dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel, dengan ketentuan:

a) Jika Thitung > Ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.

b) Jika Thitung < Ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak.

3) Uji f

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1, X2, X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat (Y). Uji ini dapat diketahui dengan cara:

a) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 diterima.

b) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. KPP Pratama Surabaya Karangpilang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III dan Bali. Launching dan saat mulai operasi dilakukan pada tanggal 4 Desember 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Karangpilang merupakan hasil pemecahan wilayah dari 2 (dua) KPP yaitu KPP Surabaya Wonocolo (Kecamatan Karangpilang dan Kecamatan Wiyung) dan KPP Surabaya Sawahan (Kecamatan Dukuh Pakis). Ketiga kecamatan tadi terdiri dari 12 Kelurahan, dengan luas wilayah 29,06 km2.

Berikut adalah batasan wilayah KPP Pratama Surabaya Karangpilang yaitu:

- Sebelah Utara : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
- Sebelah Timur : Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo
- Sebelah Selatan: Wilayah KPP pratama Sidoarjo Utara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Barat : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Periode Jabatan Kepada KPP Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut:

1) Djoko Samiadji (13 November 2007 s.d. 22 Februari 2008)
2) Bambang Suminto (22 Februari 2008 s.d. 1 Juli 2008)
3) I Ketut Bagiarta (1 Juli 2008 s.d. 16 September 2008)
4) Muhammad Faiz (16 September 2008 s.d. 13 Januari 2012)
5) Agus Mulyono (13 Januari 2012 s.d. 30 April 2015)
6) Rachmat Jaya (30 April 2015 s.d. sekarang)

Tugas Pokok KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama adalah:

1) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyidikan informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3) Pegadiministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya.
4) Penyuluhan perpajakan.
5) Pelaksanaan registrasi WP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pelaksanaan ekstensifikasi.

7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan, penagihan pajak.

8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

9) Pengawasan kepatuhan perpajakan WP.

10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

11) Pelaksanaan intensifikasi.

12) Pelaksanaan ketetapan pajak.

13) Pelaksanaan administrasi kantor.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

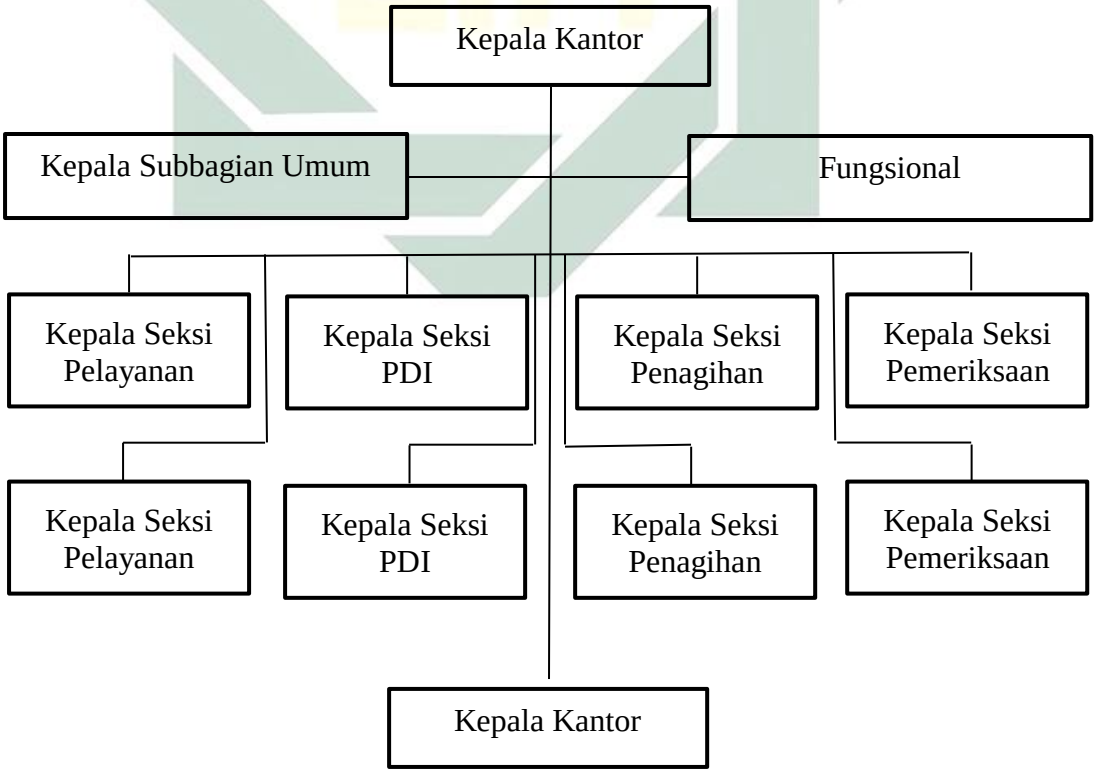

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
   a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

      Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara

   b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

      1) Mengumpulkan penerimaan bedasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hokum yang adil.
      2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
      3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional, dan
      4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2. Visi, Misi dan Motto Pelayanan KPP Pratama Surabaya Karangpilang
   a. Visi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

      Menjadi kantor pelayanan dan pengimpun pajak terbaik di Indonesia.

   b. Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

      Menyelenggarakan pelayanan dan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan secara adil, jujur dan transparan guna terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.

   c. Motto Pelayanan KPP Pratama Surabaya Karangpilang

      - Profesional
      - Ramah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ikhlas
- Maksimal
- Akurat

3. Fungsi pada Masing-masing Bagian dalam Struktur Organisasi

➢ Sub-Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub-bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

➢ Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsauran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki menjadikan Seksi penagihan sebagai tim dengan daya juang yang tinggi, ulet, dan tidak mudah menyerah.

➢ Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksa pajak, dan administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

- Seksi Pelayanan

  Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, peenrimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi

  Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

  Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjuang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) terdiri dari suatu seksi dengan tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan tiga seksi dengan tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Wilayah kerja seksi pengawasan dan konsultasi I mencakup selusuh wilayah kerja di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sedangkan sesksi pengasan dan konsultasi II meliputi Kelurahan Warunggunung di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Balas Klumprik dan Kelurahan Babatan di Kecamatan Wiyung, serta Kelurahan Pradah Kali Kendal di Kecamatan Dukuh Pakis. Seksi pengawasan dan konsultasi III meliputi di Kelurahan Dukuh Kupang, Kelurahan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunungsari yang wilayahnya terletak di Kecamatan Dukuh Pakis, serta Kelurahan jajar Tunggal di Kecamatan Wiyung. Seksi pengawasan dan konsultasi IV meliputi Kelurahan Wiyung di Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus, Kelurahan Kebraon serta Kelurahan Karangpilang yang terletak di Kecamatan Karangpilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

- Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsilitasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifiaksi dan himbauan kepada Wajb Pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Fungsional Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan secara efektif untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan.

B. Statistik Deskriptif

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini terbagi berdasarkan jenis usaha, tarif pajak PPh Badan yang digunakan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, menggunakan konsultan atau tidak, dan apakah perusahaan menggunakan konsutlan pajak atau tidak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan kelompoknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha

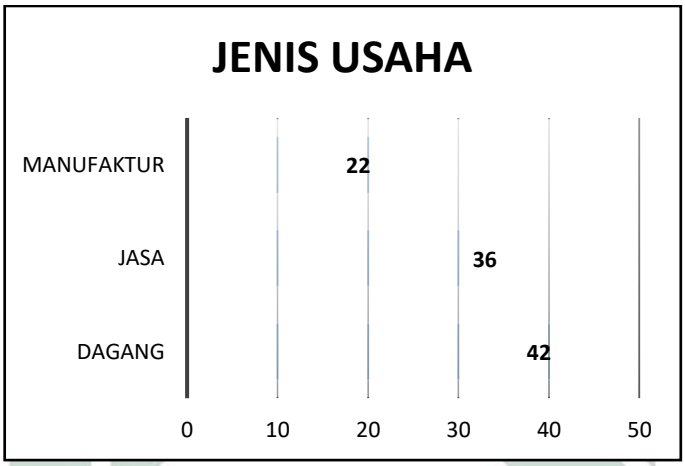

Grafik diatas menunjukkan bahwasannya sebagian besar responden dalam penelitian adalah perusahaan dagang dengan jumlah responden sebanyak 42. Kemudian perusahaan manufaktur mencapai 22 responden dan 36 untuk perusahaan jasa.

2. Data Responden Berdasarkan Tarif

Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Tarif

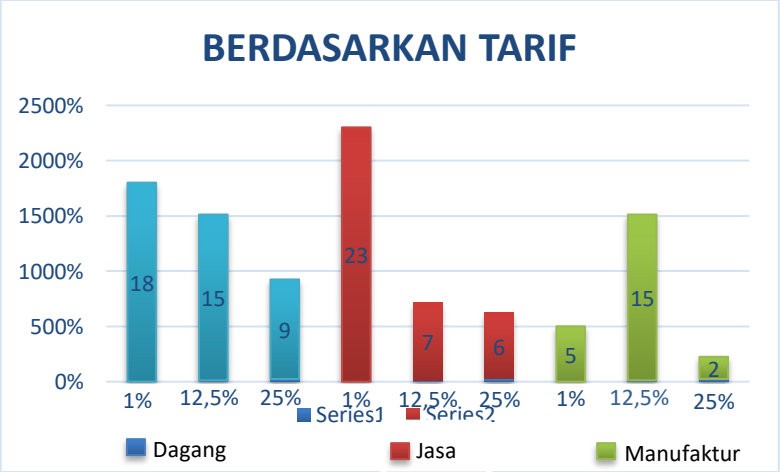

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa perusahaan jasa yang memakai tarif pajak sebesar 1% adalah yang tertinggi sebanyak 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden. Disusul oleh perusahaan dagang dengan tarif pajak 1% sebanyak 18 responden. Peringkat ketiga dengan tarif pajak 12,5% perusahaan dagang sebesar 15 responden dan perusahaan manufaktur dengan tarif yang sama sebesar 15 responden. Kemudian perusahaan dagang yang memakai tarif pajak 25% sebanyak 9 orang dan perusahaan jasa tarif 12,5% sebanyak 7 orang. Pada tingkat selanjutnya tarif pajak 25% perusahaan jasa sebanyak 6 orang dan tarif pajak 1% perusahaan manufaktur sebanyak 5 orang. Terakhir perusahaan manufaktur dengan tarif pajak yang digunakan sebesar 25% sebanyak 2 responden.

3. Data Responden Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang Menggunakan Konsultan dan yang Tidak Menggunakan Konsultan

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Wajib Pajak Badan yang Menggunakan Konsultan dan yang Tidak Menggunakan Konsultan

Jenis Usaha	Presentase Tarif	Jumlah responden	Menggunakan Konsultan	Tidak Menggunakan Konsultan
Dagang	1%	18	10	8
	12,5%	15	11	4
	25%	9	9	0
Jasa	1%	23	15	8
	12,5%	7	7	0
	25%	6	6	0
Manufaktur	1%	5	3	2
	12,5%	15	15	0
	25%	2	2	0
Total		100	78	22

Tabel diatas merupakan daftar perusahaan yang menggunakan konsultan dan yang tidak menggunakan konsultan berdasarkan jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha dan presentase tarif pajak yang digunakan. Dimulai dari perusahaan dagang dengan tarif 1% dengan jumlah responden 18 perusahaan, sesuai sampel yang diambil sebagian besar jenis perusahaan dengan tarif ini tidak menggunakan konsultan pajak, yaitu yang menggunakan konsultan pajak sebanyak 8 perusahaan dan yang tidak menggunakan konsultan pajak sebanyak 10 perusahaan. Tarif 12,5% untuk perusahaan dagang dengan jumlah 15 perusahaan yang menggunakan konsultan pajak sebanyak 11 perusahaan dan 4 perusahaan tidak menggunakan konsultan pajak. Sedangkan perusahaan dagang tarif 25% dengan jumlah responden 9 perusahaan, hasilnya semuanya menggunakan konsultan pajak yakni sebanyak 9 perusahaan menggunakan konsutlan pajak dan tidak ada yang tidak menggunakan konsultan pajak.

Kemudian untuk perusahaan jasa yang menggunakan tarif pajak 1% dengn jumlah responden 23, terdapat 15 perusahaan yang menggunakan konsultan pajak dan 8 perusahaan yang tidak menggunakan konsultan pajak. Sedangkan tarif pajak 12,5% perusahaan jasa dengan 7 jumlah responden, hasil berdasarkan survey, semuanya menggunakan konsultan pajak untuk jenis usaha dengan tarif 12,5%. Demikian pula untuk perusahaan jasa tarif 25% dengan jumlah responden 6 menggunakan konsutlan pajak. Kemudian perusahaan manufaktur dengan tarif 1% berjumlah 5 responden yang hasilnya 3 perusahaan menggunakan konsultan dan 2 perusahaan tidak menggunakan konsultan. Untuk tarif pajak 12,5% perusahaan manufaktur berjumlah 15 responden dan dari 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden tersebut semuanya menggunakan konsultan pajak begitu pula dengan perusahaan manufaktur dengan tarif 25% yang berjumlah 2 responden seluruhnya menggunakan konsultan pajak.

4. Data Responden Berdasarkan Klasifikasi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian, didapatkan hasil jawaban responden sebagai beikut:

Tabel 4.2 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-Filing

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	X1.1	0	0	0	24	76
2	X1.2	0	0	6	29	65
3	X1.3	0	0	2	27	71
4	X1.4	0	0	8	24	68
5	X1.5	0	0	8	31	61

Tabel 4.3 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-SPT

No		Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1		X2.1	0	1	9	23	67
2		X2.2	0	0	15	25	60
3		X2.3	0	1	15	20	64
4		X2.4	0	0	1	46	53
5		X2.5	1	1	10	21	67
6		X2.6	0	1	15	28	57

Tabel 4.4 Jawaban Responden Berkaitan dengan Penerapan *e*-Faktur

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	X3.1	0	0	5	23	72
2	X3.2	0	0	4	23	73
3	X3.3	0	0	3	24	73
4	X3.4	0	0	7	27	66
5	X3.5	0	0	9	21	70
6	X3.6	0	0	21	50	29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.5 Jawaban Responden Berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Y.1	0	1	7	26	66
2	Y.2	0	0	7	32	61
3	Y.3	0	1	7	30	62

Tabel 4.6 Daftar Hasil Skor Variabel Penelitian

Variabel	Skor Total	Presentase	Kategori
X1	463	93%	Tinggi
X2	448,5	90%	Tinggi
X3	455,7	91%	Tinggi
Y	454,67	91%	Tinggi

Tabel 4.7 Rentang Kategori Hasil Skor Berdasarkan Skala Likert

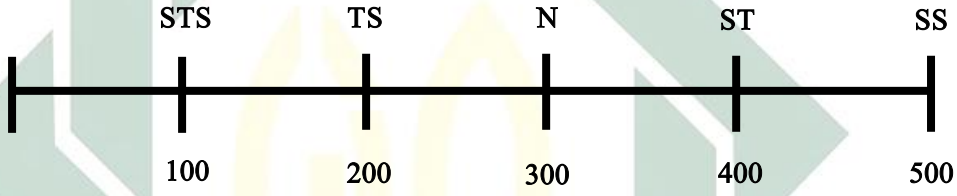

Berdasarkan hasil survei, skor total pertanyaan mengenai variabel e-Filing adalah sebesar 463 dengan presentase rata-rata 93% yang tergolong dalam kategori tinggi. Variabel X2 yakni e-SPT memiliki skor total 448,5 dengan presentase keseluruhan sebesar 90% yang juga tergolong kategori tinggi. Variabel e-Faktur dengan total skor 455,7 dan presentase sebesar 91% yang tergolong kategori tinggi. Variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki total skor 454, 67 dengan hasil presentase sebesar 91% yang juga termasuk kedalam kategori tinggi.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyebaran 120 kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang kembali dan diisi secara lengkap sebanyak 100, sehingga kuesioner yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner tersebut diambil dari Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel penelitian baik variabel dependen maupun independen yaitu e-Filing (X1), e-SPT (X2), e-Faktur (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

1. Uji Validitas

Validitas adalah alat ukur instrumen dengan tujuan untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian bersifat sah/valid. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sugiyono memaparkan tiga pendekatan untuk mengukur validitas antara lain:

a. Pengujian Validitas Konstruksi (Construct Validity)

Pendekatan uji validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan isi instrument dengan materi pelajaran yang telah diajarkan.

b. Pengujian Validitas Isi (Content Validity)

Pendekatan ini menjelaskan apabila item-item pertanyaan yang memadai dan representative untuk mengukur construct sesuai dengan yang diinginkan peneliti, maka pertanyaan tersebut bersifat content validity. Sugiyono menjelaskan "secara teknik pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen dimana dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan nomor butir (item) eprtanyaan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator". Pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis dengan adanya kisi-kisi instrumen tersebut.

c. Pengujian Validitas Eksternal

Berdasarkan beberapa pendekatan validitas menurut Sugiyono, peneliti menggunakan bantuan SPSS untuk mengukur validitas dari butir instrumen yang diteliti.

Menurut Sugiyono memaparkan bahwa untuk dapat mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen itu valid atau tidak yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total (Y). Jadi untuk keperluan ini ada tujuh koefisien korelasi yang perlu yang perlu dihitung. Bila rhitung diatas 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen yang digunakan valid, namun bila rhitung di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

1) Uji Validitas Variabel e-Filing (X1)

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas e-Filing (X1)

Pertanyaan	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0,334	0,30	Valid
2	0,461	0,30	Valid
3	0,375	0,30	Valid
4	0,763	0,30	Valid
5	0,716	0,30	Valid

Tabel diatas menunjukkan valditas hasil kuesioner untuk variabel bebas X1 dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa rhitung lebih besar daripada rkritis, maka butir pertanyaan yang ada pada variabel X1 adalah valid.

2) Uji Validitas Variabel e-SPT (X2)

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas e-SPT (X2)

Pertanyaan	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0,610	0,30	Valid
2	0,479	0,30	Valid
3	0,443	0,30	Valid
4	0,479	0,30	Valid
5	0,409	0,30	Valid
6	0,541	0,30	Valid

Tabel diatas menunjukkan valditas hasil kuesioner untuk variabel bebas X2 dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas menunjukkan bahwa rhitung lebih besar daripada rkritis, maka butir pertanyaan yang ada pada variabel X2 adalah valid.

3) Uji Validitas Variabel e-Faktur (X3)

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas e-Faktur (X3)

Pertanyaan	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0,676	0,30	Valid
2	0,678	0,30	Valid
3	0,664	0,30	Valid
4	0,756	0,30	Valid
5	0,711	0,30	Valid
6	0,473	0,30	Valid

Tabel diatas menunjukkan valditas hasil kuesioner untuk variabel bebas X3 dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas menunjukkan bahwa rhitung lebih besar daripada rkritis, maka butir pertanyaan yang ada pada variabel X3 adalah valid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pertanyaan	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0,611	0,30	Valid
2	0,873	0,30	Valid
3	0,867	0,30	Valid

Tabel diatas menunjukkan valditas hasil kuesioner untuk variabel terikat Y dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas menunjukkan bahwa rhitung lebih besar daripada rkritis, maka butir pertanyaan yang ada pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Cronbach Alpha merupakan tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Pada penilitan ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	*Cronbach Alpha*	Kriteria	Keterangan
1	*e*-Filing	0,699	0,6	Reliabel
2	*e*-SPT	0,671	0,6	Reliabel
3	*e*-Faktur	0,760	0,6	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,818	0,6	Reliabel

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)

Uji normalitas dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran skor dari hasil kuesioner yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS V.25. Uji normalitas di SPSS dapat diketahui melalui gambar histogram maupun Normal Probability Plot.

Menurut Imam Ghozali, mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan Non-parametrik statistic dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai berikut:[48]

Hipotesis Nol (Ho) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal

Berdistribusi secara normal ata tidak dapat diketahui dengan cara apabila skor signifikansi pada tabel K-S lebih besar atau sama dengan 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima atau artinya hasil olah data kuesioner berdistribusi normal. Sedangkan apabila skor signifikansi

[48] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. Edisi 9* (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2018), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak atau artinya hasil olah data kuesioner berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.13 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,13133495
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,048
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,796
Asymp. Sig. (2-tailed)		,550

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa hasil *Symp.Sig.(2-tailed)* pada *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan angka sebesar 0,550. Angka ini lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan hipotesis nol (Ho) diterima.

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Apabila korelasi tidak terjadi maka problem autokorelasi tidak ada, begitu pula sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Imam Ghozali adalah sebagai berikut:[49]

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 – dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 – du \leq d \leq 4 – dl$
Tidak ada autokoelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 – dl$

Berdasarkan tabel pengambilan keputusan tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 dengan 3 variabel independent yaitu e-Filing, e-SPT dan e-Faktur. Dari 100 sampel dengan 3 variabel yang digunakan maka nilai dL dan dU pada tabel Durbin Waston adalah 1,6131 (dL) dan 1,7364 (dU).

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]	
Model	Durbin-Watson
1	2,052

Berdasarkan hasil uji SPSS, diketahui untuk autokorelasi yang menggunakan rumus Durbin-Waston menghasilkan angka 2,052. Dasar keputusan apakah data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi adalah ketika nilai dU < d < 4 - dL. Berdasarkan hasil SPSS nilai Durbin-Watson (d) adalah 2,502. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil SPSS Durbin-Watson bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negative karena nilai 1,7364 (dU) < 2,052 (d) < 2,421 (4-dL) yaitu berarti data

[49] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9* …, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil kuesioner yang digunakan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

c) Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dari uji multikolinearitas menurut Imam Ghazali adalah berdasarkan nilai tolerance atau berdasarkan nilai VIF.[50]

Berdasarkan Nilai Torelance

Tolerance > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
Tolerance < 0,10	Terjadi multikoleniaritas

Berdasarkan nilai VIF

VIF > 10,00	Tidak terjadi multikolinearitas
VIF < 10,00	Terjai multikolinearitas

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
e-Filing (X_1)	,992	1,008
e-SPT (X_2)	,879	1,137
e-Faktur (X_3)	,882	1,134

[50] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*, …107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilia tolerance variabel *e*-Filing (X_1) sebesar 0,992 dan nilai VIF 1,008. Angka tolerance tersebut lebih besar dari pada 0,10 dan VIF lebih kecil 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e*-Filing (X_1) tidak terjadi multikolinearitas. Variabel *e*-SPT menghasilkan nilai tolerance 0,879 dan nilai VIF 1,137, maka variabel X_2 juga tidak terjadi multikolinearitas. Variabel X_3 memiliki nilai tolerance 0,882 dan VIF 1,134, ini berarti variabel X_3 juga tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan dari tabel uji diatas bahwa baik untuk variabel X_1, X_2 maupun X_3 tidak terjadi multikolinearitas

d) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan untuk menguji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji gletser menurut Imam Ghazali adalah sebagai berikut:[51]

Sign. > 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sign. < 0,05	Terjadi heterokedastisitas

Dari tabel diatas terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05.

[51] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. Edisi 9,…* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Sig.
(Constant)	,504
EFILING_X1	,122
ESPT_X2	,463
EFAKTUR_X3	,600

Berdasarkan hasil uji SPSS pada tabel diatas diketahui bahwa nilai sign. Dari variabel e-Filing (X1) sebesar 0,122, pada variabel e-SPT sebesar 0,463 dan pada variabel e-Faktur (X3) adalah sebesar 0,600. Angka-angka tersebut lebih besar dari pada 0,05 yang berarti ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian (e-Filing, e-SPT dan e-Faktur) tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independent e-Filing (X1), e-SPT (X2), dan e-Faktur (X3) baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandarized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	-8,544	2,458	-3,476	,001
e-Filing (X_1)	,469	,074	6,297	,000
e-SPT (X_2)	,235	,058	4,067	,000
e-Faktur (X_3)	,183	,052	3,515	,001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Uji Parsial

Tabel hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan e-Filing memiliki nilai thitung sebesar 6,297 dimana angka ini lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,98397 dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel e-SPT menunjukkan angka thitung sebesar 4,067 > 1,98397 (t_{tabel}) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-SPT juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel e-Faktur menunjukkan angka thitung sebesar 3,515 > t_{tabel} = 1,98397 dan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-Faktur juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Tabel 4.18 Hasil Uji F

ANOVA[b]

Model	F	Sig.
Regression Residual Total	27,357	,000[a]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Uji Simultan (Uji F)

Hasil olah data SPSS diatas menunjukkan nilai F_{hitung} = 27,357 > F_{tabel} = 3,09 dengan signifikansi = 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa e-Filing, e-SPT dan e-Faktur memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679[a]	,461	,444	1,14888

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil data olah SPSS diperoleh angka koefisien determinasi Adjusted R Square = 0,444 atau jika dipresentasekan adalah sebesar 44%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-Filing, e-SPT dan e-Faktur mempunyai pengaruh sebesar 44% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sedangkan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh variabel / faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan hasil uji hipotesisis penelitian, variabel e-Filing menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,000. Angka 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai thitung sebesar 6,297 lebih besar dari pada ttabel sebesar 1,98397 yang artinya variabel bebas e-Filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa e-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel bebas e-Filing memiliki pengaruh signifikan juga disebabkan karena variabel e-Filing tidak terjadi multikolineritas dengan nilai tolerance 0,992 lebih dari 0,10 (batas nilai yang tolerance yang mengandung multikolinearitas). Sedangkan nilai VIF sebesar 1,008 lebih kecil dari pada 10 (batas nilai VIF yang terjadi multikolinearitas) yang artinya variabel e-Filing tidak terjadi multikolineritas sehingga nilai signifikan t parsial besar. Nilai beta variabel e-Filing pada uji parsial yang dilakukan adalah sebesar 0,474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengartikan bahwa variabel e-Filing memiliki pengaruh sebesar 47% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari Nur Hidayah yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nur Hidayah menyatakan bahwa variabel e-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.[52]

Pengaruh signifikan yang terjadi juga selaras dengan hasil salah satu uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada data kuesioner yang digunakan oleh peneliti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi akan berpengaruh kepada nilai standard error of the estimate pada model summary dan nilai thitung pada koefisien regresi e-Filing tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-Filing sebesar 0,469 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-Filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-Filing berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-Filing akan mengakibatkan kenaikan pada variabel

[52] Sari Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem *E*-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten", (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-Filing sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 463 dan presentase rata-rata keseluruhan 93%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa e-Filing membantu Wajib Pajak Badan untuk melapor SPT Wajib Pajak karena tidak perlu lagi lapor ke KPP sehingga Wajib Pajak akan tepat waktu dalam pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT perpajakan karena adanya e-filing. Sesuai dengan wawancara, sebelum adanya e-Filing Wajib Pajak masih harus datang ke KPP dan menunggu antrean yang lama untuk melaporkan perpajakannya. Antrean yang banyak ini sering terjadi ketika mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Antrean ini selain menyulitkan Wajib Pajak, juga membuat Pegawai KPP kewalahan dalam melayani Wajib Pajak karena antrean yang banyak. Jawaban dari wawancara dengan Wajib Pajak Badan mengatakan bahwa antrean ini merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam hal penyampaian SPT yang mana hal ini merupakan salah satu indikator dalam Kepatuhan Wajib Pajak.

Adanya e-Filing, Wajib Pajak dapat melapor pajak secara online sehingga mengefisiensi waktu, tenaga dan biaya penggunaan kertas. Wajib Pajak Badan tidak perlu mengantri untuk melaporkan perpajakannya karena dengan e-filing, Wajib Pajak diberikan akses untuk melaporkannya secara online. Akses pelaporan pajak dengan e-Filing yang fleksibel serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasinya data yang lengkap sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data lengkap yang dimaksud adalah bukti penyampaian SPT elektronik yang akan dikirimkan melalui email saat e-Filing didaftarkan. Data tersebut tidak akan hilang walaupun email yang digunakan berubah karena bukti penyampaian SPT elektronik akan tetap ada pada akun e-Filing dan dapat dikirimkan ulang ke alamat email baru dengan mengubah alamat email terlebih dahulu pada profile Wajib Pajak.

Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan adanya penerapan e-Filing menimbulkan rasa kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak. Rasa kepuasan yang dirasakan akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Technologi Acceptance Model (TAM) yakni menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.[53] Jadi semakin baik teknologi e-Filing ini diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

[53] Fred Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease pf Use and Acceptance of Information System Technology", (Disertasi—Sloan School of Management MIT), 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan hasil uji hipotesisis penelitian, variabel e-SPT menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,000. Angka 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai thitung sebesar 4,067 lebih besar dari pada ttabel sebesar 1,98397 yang artinya variabel bebas e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa e-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Signifikansi e-SPT dan e-Filing pada tabel koefisien regresi memiliki nilai signifikan yang sama yaitu 0,000, namun jika dilihat dari aspek lain yakni nilai thitung menunjukkan bahwa e-Filing lebih memiliki pengaruh signifikan dari pada e-SPT. Dibuktikan dari nilai thitung yang lebih besar berarti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai thitung pada variabel e-Filing sebesar 6,297 lebih besar dari e-SPT 1,137 yang berarti e-Filing lebih memiliki pengaruh yang signifikan daripada e-SPT. Nilai beta variabel e-SPT pada uji parsial yang dilakukan adalah sebesar 0,325 yang mengartikan bahwa variabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e-SPT memiliki pengaruh sebesar 32,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel bebas e-SPT memiliki pengaruh signifikan juga disebabkan karena variabel e-SPT tidak terjadi multikolineritas dengan nilai tolerance 0,879 lebih dari 0,10 (batas nilai yang tolerance yang mengandung multikolinearitas). Sedangkan nilai VIF sebesar 1,137 lebih kecil dari pada 10 (batas nilai VIF yang terjadi multikolinearitas) yang artinya variabel e-SPT tidak terjadi multikolineritas sehingga nilai signifikan t parsial besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Naniek Noviari yang berjudul "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-Biling dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan". Penelitian yang dilakukan oleh Naniek Noviari menyatakan bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Perngusaha Kena Pajak Badan.[54]

Pengaruh signifikan yang terjadi juga selaras dengan hasil salah satu uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada data kuesioner yang digunakan oleh peneliti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi akan berpengaruh kepada nilai standard error of the estimate pada model summary dan nilai thitung pada

[54] Naniek Noviatri, "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan *e*-Biling dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajaan", (Jurnal Akuntansi—Universitas Udayana, 2016), 1025

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koefisien regresi e-SPT tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-SPT sebesar 0,235 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-SPT berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-SPT akan mengakibatkan kenaikan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-SPT sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 448 dan presentase rata-rata keseluruhan 90%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa e-SPT membantu Wajib Pajak Badan dalam pembuatan SPT karena dengan menggunakan e-SPT, perekaman data dapat dilakukan secara cepat. Wajib Pajak karena tidak perlu lagi membuat SPT dengan menggunakan excel ataupun menuliskannya secara manual.

Dengan diterapkannya e-SPT, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. Perhitungan pajak juga dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data yang disimpan dalam aplikasi e-SPT pun juga selalu lengkap karena data perpajakannya akan tersimpan secara otomatis dalam database e-SPT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan adanya e-SPT juga meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data perpajakan sehingga menimbulkan rasa kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak. Rasa kepuasan yang dirasakan akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Technologi Acceptance Model (TAM) yakni menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.[55] Jadi semakin baik teknologi e-SPT ini diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

C. Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan hasil uji hipotesisis penelitian, variabel e-Faktur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,001. Angka 0,001 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai thitung sebesar 3,515 lebih besar dari pada ttabel sebesar 1,98397 yang artinya variabel bebas e-Faktur memiliki

[55] Fred Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease pf Use and Acceptance of Information System Technology"…, 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa e-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Signifikansi e-Faktur pada tabel koefisien regresi memiliki nilai signifikan yang paling rendah jika dibandingkan dengan signifikansi variabel e-Filing dan e-SPT. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan dimana nilai perbedaan yang terjadi hanya 0,001. Nilai perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi e-Filing dan e-SPT adalah sama yaitu 0,000, dan e-Faktur 0,001. Jika dilihat dari aspek nilai thitung menunjukkan bahwa e-Filing paling memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dari pada e-SPT dan e-Faktur. Dibuktikan dari nilai thitung yang lebih besar berarti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Nilai thitung pada variabel e-Filing sebesar 6,29, kemudian pada posisi kedua yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu e-SPT sebesar 1,137 dan posisi terakhir variabel e-Faktur dengan nilai thitung sebesar 3,515. Nilai beta variabel e-Faktur pada uji parsial yang dilakukan adalah sebesar 0,474 yang mengartikan bahwa variabel e-Faktur memiliki pengaruh sebesar 28% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Variabel bebas e-Faktur memiliki pengaruh signifikan juga disebabkan karena variabel e-Faktur tidak terjadi multikolineritas dengan nilai tolerance 0,882 lebih dari 0,10 (batas nilai yang tolerance yang mengandung multikolinearitas). Sedangkan nilai VIF sebesar 1,134 lebih kecil dari pada 10 (batas nilai VIF yang terjadi multikolinearitas) yang artinya variabel e-Faktur tidak terjadi multikolineritas sehingga nilai signifikan t parsial besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh yang berjudul "Pengaruh e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)". Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh menyatakan bahwa e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta.[56]

Pengaruh signifikan yang terjadi juga selaras dengan hasil salah satu uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada data kuesioner yang digunakan oleh peneliti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi akan berpengaruh kepada nilai standard error of the estimate pada model summary dan nilai thitung pada koefisien regresi e-Faktur tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

[56] Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakn Terhdapat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)", (Jurnal Akuntansi—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 716

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-Faktur sebesar 0,182 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-Faktur dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-Faktur berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-Faktur akan mengakibatkan kenaikan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-Faktur sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 456 dan presentase rata-rata keseluruhan 91%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa e-Faktur membantu Wajib Pajak Badan dalam pembuatan Faktur Pajak dan SPT PPN karena dengan menggunakan e-Faktur, perekaman data dapat dilakukan secara cepat. Wajib Pajak karena tidak perlu lagi membuat SPT PPN dengan menggunakan excel ataupun menuliskannya secara manual.

Dengan diterapkannya e-Faktur, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. Perhitungan pajak juga dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data yang disimpan dalam aplikasi e-Faktur pun juga selalu lengkap karena data perpajakannya akan tersimpan secara otomatis dalam database e-Faktur.

Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan adanya e-Faktur juga meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpajakan sehingga menimbulkan rasa kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak. Rasa kepuasan yang dirasakan akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Technologi Acceptance Model (TAM) yakni menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.[57] Jadi semakin baik teknologi e-Faktur ini diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

D. Pengaruh Penerapan e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan hasil uji hipotesisis penelitian, variabel e-Filing, e-SPT dan e-Faktur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel anova sebesar 0,000. Angka 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 27,357 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 3,09 yang artinya variabel bebas e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya

[57] Fred Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease pf Use and Acceptance of Information System Technology"…, 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Berdasarkan hasil dari modal summary pada SPSS diperoleh nilai R sebesar 0,679 yang berarti pengaruh variabel e-Filing, e-SPT dan e-Faktur adalah 67,9% (0,679 x 100%). Namun nilai tersebut dikatakan terkontaminasi oleh berbagai nilai pengganggu yang mungkin menyebabkan kesalahan pengukuran. Oleh karena itu kita juga bisa melihat dari nilai R Square sebesar 0,461 atau 46%, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilia R karena adanya penyesuaian, akan tetapi nilai R Square ini tidak serta merta lebih kecil, nilai R Square juga bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dari nilai R. Lebih akuratnya prediksi pengaruh dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square = 0,444 atau jika dipresentasekan adalah sebesar 44%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan mempunyai pengaruh sebesar 44% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sedangkan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh variabel / faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel Model Summary juga diperoleh nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1,14888. Nilai Std. Error of the Estimate ini baik untuk djadikan predicator dalam menentukan variabel terikat jika Std. Error of the Estimate $\bar{-}$ Std. Deviation. Sebaliknya jika nilai Std. Error of the Estimate $\bar{-}$ Std. Deviation

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Std. Error of the Estimate tidak baik untuk dijadikan predikator dalam menentukan variabel terikat. Dalam penelitian ini nilai Std. Error of the Estimate = 1,114888 Std. Deviation = 1,54082 (e-Filing), 1,55735 (e-SPT), 2,12772 (e-Faktur) dan 2,36652 (Kepatuhan Wajib Pajak Badan). Dapat disimpulkan bahwa dengan angka sebesar itu maka dikatakan model yang terbentuk akurat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh yang berjudul "Pengaruh e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)". Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh menyatakan bahwa penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing, dan penerapan e-Faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta.[58]

Adanya pengaruh signifikan dan hubungan yang kuat dari e-Filing, e-SPT dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat juga dari jawaban responden atas item pertanyaan yang disuguhkan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 91% responden menjawab sangat setuju pada item pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak dengan skor total 455. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa e-system perpajakan sangat membantu Wajib Pajak Badan baik dalam penyampaian

[58] Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakn Terhdapat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)", (Jurnal Akuntansi—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 716

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan pajak melalui e-Filing, pembuatan SPT elektronik dengan menggunakan e-SPT dan pembuatan faktur pajak dan SPT PPN pada aplikasi e-Faktur.

Dengan diterapkannya e-system perpajakan, memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang kemudian berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang meliputi : (1) perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan (3) perusahaan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif sebagian besar menggunakan jasa konsultan pajak. Pada dasarnya konsultan pajak adalah jasa yang diberikan untuk membantu Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya konsultan pajak secara langsung akan membantu Wajib Pajak Badan untuk semakin patuh karena perpajakan yang ada dalam perusahaan Wajib Pajak Badan akan dikerjakan oleh konsultan pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan yaitu e-filing, e-SPT dan e-Faktur akan mudah dikerjakan oleh perusahaan Wajib Pajak ketika Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak yang notabenenya itu merupakan makanan sehari-hari bagi konsultan pajak. Hal ini juga mempengaruhi penelitian e-system perpajakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di KPP Pratama Karangpilang yang akhirnya menghasilkan bahwa e-system perpajakan berpenagruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Technologi Acceptance Model (TAM) yakni menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.[59] Jadi semakin baik teknologi e-System Perpajakan (e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur) ini diterima dan digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

[59] Fred Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease pf Use and Acceptance of Information System Technology"…, 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Dibuktikan dari hasil olah data SPSS yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel e-Filing sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai thitung sebesar 6,297 lebih dari ttabel 1,98397. Nilai signifikansi variabel e-SPT sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai thitung sebesar 4,067 lebih dari ttabel 1,98397. Dan nilai signifikansi pada variabel e-Faktur sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai thitung sebesar 3,515 lebih dari ttabel 1,98397.
2. Terdapat pengaruh signifikan penerapan e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Dibuktikan dari hasil olah data SPSS yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada tabel anova sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 27,357 Ftabel 3,09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitian, mengingat adanya faktor lain yang mempengaruhi model penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian hingga mencakup seluruh Kantor Pajak Pratama di Surabaya atau bahkan dapat dilakukan penelitian pada Kantor Pajak Pratama di seluruh Indonesia sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Fika dkk, "Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Grogol Petanburan". Jurnal dan Simposium Nasional Akuntansi—Universitas Indonesia, 2009.

Astuti, Inne Nidya. "Analisis Penerapan *e*-Filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresi Utara". Jurnal Akuntansi—Universitas Negeri Surabaya, 2016.

Budi, Prianto. *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Pratama Indomitra, 2017.

Davis, Fred. "Perceived Usefulness, Perceived Ease pf Use and Acceptance of Information System Technology". Disertasi—Sloan School of Management MIT, 1986.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Sembilan*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2018.

Hardi, Andi dan Sjafardamsah. *Sosulis Sukses e-Faktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Indrianti, Irma dkk, "Pengaruh Penerapan *e*-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)", Jurnal Seminar Nasional IENACO, ISSN 2337 – 4349, 2017.

Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Noviatri, Naniek. "Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan *e*-Biling dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajaan". Jurnal Akuntansi Vol.15.2 Mei (2016):1001-1028 ISSN: 2302-8556, 2016.

Nurhidayah, Sari. "Pengaruh Penerapan Sistem *E*-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten". Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.

Pasal 29 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Rahayu, Sri dan Lingga Salsalina Ita, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada KPP Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009.

Rahman, Abdul. *Pandukan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa, 2010.

Sari, Novi Purnama. "Pengaruh Penerapan *e*-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). Tesis—Universitas Brawijaya, 2014.

Soemitro, Rachmat dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2015.

Tansuria, Billy Ivan. *Pokok Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 1

Direktorat Jenderal Pajak, "*e*-Faktur", dalam http://www.pajak.go.id/content/article/e-faktur, diakses pada 3 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 1 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak, "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 5 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak, "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 2 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kienrja 2016", dalam http://www.pajak.go.id/, diakses pada 2 Januari 2018.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,1 Persen", dalam http/www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/, diakses pada 28 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id